

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 99/PMK.03/2018  
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK  
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI  
USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH  
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN  
BRUTO TERTENTU

A. CONTOH PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIH DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN

Nomor : ..... (1)  
Hal : Pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak  
Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat  
(1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal  
31E Undang-Undang Pajak Penghasilan

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
..... (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (3)  
NPWP : ..... (4)  
Nomor telepon : ..... (5)  
Bertindak selaku:  Wajib Pajak  
 wakil/kuasa\*) dari Wajib Pajak  
Nama : ..... (6)  
NPWP : ..... (7)  
Alamat : ..... (8)  
Nomor telepon : ..... (9)

memberitahukan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Demikian disampaikan.

....., .....20....(10)

.....(11)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada  yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi diisi pada  Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi pada  Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak
2. \*) coret salah satu

## Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nama penandatangan surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP penandatangan surat pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor telepon penandatangan surat pemberitahuan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor telepon Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Tanda tangan dan nama terang Wajib Pajak/wakil/kuasa.

B. CONTOH PERMOHONAN SURAT KETERANGAN

Nomor : ..... (1)  
Hal : Permohonan Surat Keterangan Memenuhi  
Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan  
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun  
2018.

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
..... (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (3)  
NPWP : ..... (4)  
Alamat : ..... (5)  
Nomor telepon : ..... (6)  
Bertindak selaku:  Wajib Pajak  
 wakil/kuasa\*) dari Wajib Pajak  
Nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8)  
Alamat : ..... (9)  
Nomor telepon : ..... (10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., .....20....(11)

.....(12)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada  yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi diisi pada  Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi pada  Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak
2. \*) coret salah satu

## Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nama penandatangan surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP penandatangan surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Alamat penandatangan surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor telepon penandatangan surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor telepon Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya permohonan Surat Keterangan.
- Nomor (12) : Diisi dengan Tanda tangan dan nama terang Wajib Pajak/wakil/kuasa.

C. CONTOH SURAT KETERANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP ..... (1)  
KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... (2)

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : KET- ... /PP23/WPJ ... /KP ... /20... (3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Alamat : ..... (6)

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal ..... (7)

kecuali:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.



....., .....20.... (8)  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor

..... (9)  
NIP .....

## Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan Nama Kantor Wilayah DJP.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Surat Keterangan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Tanggal akhir Tahun Pajak sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23/2018 atau tanggal akhir Tahun Pajak 2018 untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP 23/2018.
- Nomor (8) : Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya Surat Keterangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.

D. CONTOH SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP ..... (1)  
KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... (2)

Nomor : S-...../WPJ...../KP...../20..... (3)  
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Memenuhi  
Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan  
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Yth. .... (4)

Menindaklanjuti permohonan Saudara Nomor .....(5) tanggal .....(6) yang diterima pada tanggal  
.....20.....(7) atas nama Wajib Pajak:

Nama : ..... (8)  
NPWP : ..... (9)  
Alamat : ..... (10)

ditolak, dengan alasan:

- Bukan Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
- Telah memilih dikenai Pajak Penghasilan ketentuan umum Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- Peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya telah melebihi Rp4.800.000.000,00; atau
- Belum menyampaikan SPT Tahunan PPh. \*)

Demikian untuk dimaklumi.

....., .....20.... (11)  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor



..... (12)  
NIP .....

\*) bagi Wajib Pajak yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.

## Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan Surat Keterangan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor permohonan Surat Keterangan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan diterima KPP.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya penolakan permohonan Surat Keterangan.
- Nomor (12) : Diisi dengan Nama dan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plh. Kepala Bagian TU Kementerian

LUHUT M.R. LIMBONG  
NIP 196105031988101001